

KETIMPANGAN EKONOMI DAN PERBEDAAN KONSUMSI RUMAH TANGGA: STUDI KASUS KOTA VS DESA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nurliana¹⁾, Maghfirah Sari Azis²⁾, Septiannisa Paramita³⁾

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar^{1,2,3)}

Email: nurliana@unm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara ketimpangan ekonomi dan perbedaan pola konsumsi rumah tangga antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, serta literatur akademik untuk menggambarkan kondisi dan hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi, dengan Gini Ratio perkotaan sebesar 0,373 dan perdesaan sebesar 0,333 pada Maret 2025. Rata-rata pengeluaran per kapita di wilayah perkotaan mencapai Rp1.538.348 per bulan, sedangkan di perdesaan hanya Rp1.053.896, yang menggambarkan adanya kesenjangan daya beli hampir Rp500.000. Perbedaan ini mencerminkan ketimpangan pendapatan dan perbedaan struktur konsumsi. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seluruh kota madya Sulawesi Selatan telah mencapai IPM “sangat tinggi”, sedangkan sebagian besar kabupaten masih berada pada kategori “tinggi” bahkan beberapa masih “sedang” seperti Jeneponto. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang inklusif, berbasis wilayah, dan menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Ketimpangan Ekonomi, Pola Konsumsi Rumah Tangga, IPM, Perkotaan, Perdesaan*

ABSTRAK

This study aims to analyze the relationship between economic inequality and differences in household consumption patterns between urban and rural areas in South Sulawesi Province. Using a qualitative approach and secondary data from the Central Statistics Agency (BPS), the National Socio-Economic Survey (Susenas), and academic literature, this research describes the conditions and relationships among the variables. The findings show that economic inequality in South Sulawesi remains relatively high, with a Gini Ratio of 0.373 in urban areas and 0.333 in rural areas as of March 2025. The average per capita expenditure in urban areas reached IDR 1,538,348 per month, while in rural areas it was only IDR 1,053,896, indicating a purchasing power gap of nearly IDR 500,000. This disparity reflects differences in income and consumption structure. Based on the Human Development Index (HDI), all municipalities in South Sulawesi have achieved a “very high” HDI category, while most regencies remain in the “high” category, with some such as Jeneponto still classified as “moderate.” Therefore, inclusive and region-based development policies that emphasize improving human resource quality are essential to achieving equitable and sustainable economic growth.

Keywords: *Economic Inequality, Household Consumption Patterns, Human Development Index (HDI), Urban, Rural*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi dari sabang sampai merauke dan memiliki perbedaan karakteristik wilayah sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan merupakan cermin ketidakmerataan yang sistematis dan bukan hanya sekadar angka. Ketidakmerataan tersebut berpotensi akan menciptakan ketidakseragaman pada berbagai aspek kehidupan seperti akses pendidikan yang berbeda kualitas, kesenjangan pendapatan, kesempatan kerja, hingga disparitas dalam ketersediaan layanan kesehatan dan infrastruktur dasar. Kemampuan tumbuh yang berbeda ini pada akhirnya akan mengakibatkan beberapa wilayah tumbuh dengan cepat sementara wilayah lain lebih lambat. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian dari (Gunung, Setiawan, & Yasin, 2023) yang mengungkapkan bahwa ketimpangan ekonomi disebabkan oleh berbagai faktor yaitu kesenjangan pendapatan, akses pada kualitas pendidikan dan sumber daya ekonomi, dan kesenjangan sosial. Ketimpangan ekonomi memiliki konsekuensi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kesenjangan dalam masyarakat.

Berdasarkan data BPS, Susenas pada Maret 2024 ditemukan data bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan, penduduk perkotaan membelanjakan 46,07% pengeluarannya untuk makanan, sedangkan pedesaan mencapai 54,27%. Hukum Engel memiliki prinsip ekonomi bahwa semakin rendah pendapatan suatu rumah tangga, semakin besar proporsi pengeluaran untuk makanan. Sebaliknya, semakin tinggi pendapatan, semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan. Dengan prinsip tersebut, maka hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk perkotaan jauh lebih baik bila dibandingkan penduduk pedesaan. Dilihat dari per kabupaten/kota, penduduk perkotaan di Kota Pare-Pare membelanjakan sebagian kecil pengeluarannya untuk memenuhi kebutuhan makanan yaitu, 40,31%, selanjutnya Kabupaten Wajo (43,79%), dan Kota Makassar (43,89%). Keadaan ini menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan pada tiga kabupaten/kota tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Sementara itu, Kabupaten Banteng dengan tingkat persentase 54,60% memiliki persentase pengeluaran makanan dengan porsi yang paling besar.

Berdasarkan data yang ditemukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk pedesaan lebih dari 50% pengeluarannya untuk makanan kecuali tiga daerah, yaitu Parepare, Bone, dan Wajo. Hal ini mengindikasikan bahwa pola kehidupan di pedesaan masih mengutamakan kebutuhan pangan, sehingga sebagian besar penduduk pedesaan masih rendah tingkat kesejahtraannya. Data tersebut bukan sekadar fenomena statistik, melainkan cerminan dari ketimpangan struktural yang mengakar. Mengungkapkan realitas ekonomi dualistik, dimana disatu sisi penduduk perkotaan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk mengalokasikan pada pendidikan dan kesehatan. Dilain sisi, penduduk desa masih terjebak dalam pola konsumsi subsisten atau hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup tanpa ada surplus atau kelebihan sehingga hal tersebut dapat membatasi peluang peningkatan kesejahteraan mereka.

Oleh karena itu, data tersebut layak dijadikan landasan ilmiah untuk mengkaji ketimpangan ekonomi dan pola konsumsi rumah tangga, khususnya dalam konteks perbandingan antara kota dan desa di Sulawesi Selatan, untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

STUDI LITERATUR

1. Teori Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara horizontal dan vertikal yang menyebabkan perbedaan atau ketidakmerataan pembangunan (Saleh, 2021). Dalam sebuah negara, salah satu faktor penghambat dari pertumbuhan ekonomi adalah ketimpangan ekonomi.

Menurut laman *Consumer News and Business Channel* (CNBC), yang dipublikasikan pada tanggal 1 Agustus 2024, data Survei Sosial Ekonomi Nasional mengkonfirmasi terjadinya perbedaan pertumbuhan pendapatan di masyarakat yang membuat kelas kaya semakin kaya dan kelas menengah jatuh miskin. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia tersebar di berbagai tempat tinggal, seperti di desa dan kota, tentu mempunyai tingkat kesejahteraan berbeda-beda. Berdasarkan penelitian yang ditemukan oleh (Nazer & Lailatussubha, 2025) beberapa faktor yang mempengaruhi perekonomian di suatu daerah adalah pengangguran. Pengangguran yang tinggi cenderung meningkatkan ketimpangan karena kelompok menganggur tidak memperoleh penghasilan. Selain itu, pengangguran juga dapat mengakibatkan terjadinya penurunan keterampilan dan kehilangan peluang karir yang berdampak pada kesenjangan dalam jangka panjang. Faktor kedua adalah pendidikan. Pendidikan yang tidak merata dapat meningkatkan ketimpangan di Indonesia. Sehingga, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dibutuhkan akses pendidikan yang merata dan menciptakan kebijakan yang dapat memfasilitasi mobilitas sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sjafrizal dalam (Azim, Sutjipto, & Ginanjar, 2022) menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan antarwilayah, yaitu : 1) perbedaan kandungan sumber daya alam; 2) Perbedaan kondisi demografis; 3) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa; 4) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah; 5) Alokasi dana pembangunan daerah. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang terbatas, dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas serta mendorong pembangunan ekonomi sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis bahwa tinggi atau rendahnya indeks pembangunan manusia akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk. Semakin rendah indeks pembangunan manusia, maka semakin rendah pula tingkat produktivitas suatu wilayah yang akan berdampak pada pendapatan penduduk, begitupun sebaliknya. Salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan indeks pertumbuhan manusia antarwilayah adalah kondisi demografis.

Menurut (Hibaturohman & Ayu, 2024) ketimpangan ekonomi terjadi akibat adanya perbedaan yang signifikan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan di antara individu dan kelompok dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan berbagai masalah sosial termasuk kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan. Beberapa faktor yang dianggap berkontribusi terhadap ketimpangan ekonomi di era modern antara lain adalah globalisasi, teknologi, kebijakan ekonomi dan pendidikan.

2. Teori Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga merupakan suatu nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli segala kebutuhan rumah tangga dalam satu periode tertentu. Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus pemilik faktor-faktor produksi untuk memperoleh balas jasa berupa imbalan, upah, sewa, bunga dividen, dan laba. (Saragih & Damanik, 2022)

Dalam teori Keynes, konsumsi meningkat seiring kenaikan pendapatan, tetapi pada tingkat yang lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pendapatan itu sendiri. Hal ini disebut dengan *marginal propensity to consume* (MPC) yang menurun pada

pendapatan tinggi. Masyarakat dengan pendapatan tinggi sudah memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tambahan pendapatan lebih cenderung digunakan untuk tabungan atau investasi masa depan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh (Suci & Sarpini, 2024) ditemukan bahwa pola tingkat konsumsi wilayah perkotaan dan pedesaan sangat signifikan. Perkotaan cenderung memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi karena masyarakatnya memiliki pendapatan yang lebih besar. Selain itu, akses terhadap barang dan jasa jauh lebih baik, serta gaya hidup lebih modern. Sementara itu, pada masyarakat pedesaan, mereka cenderung melakukan pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dasar dan masih konservatif. Rumah tangga dengan pendapatan tinggi akan mengalokasikan pendapatan mereka untuk investasi karena mendapatkan akses informasi mengenai pentingnya investasi yang menyebabkan mereka memilih pengeluaran yang produktif dibanding konsumsi langsung.

Semakin baik tingkat pendapatan, semakin baik pula tingkat konsumsi. Kemampuan rumah tangga dalam membeli aneka konsumsi mengindikasikan bahwa pendapatannya mengalami peningkatan. Bertambahnya satu anggota pada rumah tangga miskin akan meningkatkan pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan. Hal ini berarti, jika jumlah anggota bertambah, maka alokasi konsumsinya juga akan semakin besar. Selain itu, meningkatnya tingkat Pendidikan maka akan menurunkan pengeluaran untuk bukan makanan. Hal ini menandakan bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga berpengaruh negatif (Handayani & Yulistiyono, 2023).

3. Teori Pembangunan Wilayah

Teori Malthus mengemukakan bahwa menurunnya aktivitas ekonomi lebih dari sekadar lancar atau tidaknya aktivitas ekonomi itu sendiri. Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan dampak dari adanya proses pembangunan, akan tetapi bertumbuhnya jumlah penduduk tidak dapat terjadi tanpa adanya kesejahteraan yang juga meningkat. Teori ini dapat dijadikan landasan untuk menjelaskan bahwa pembangunan wilayah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan adanya pengendalian kependudukan, pemerataan hasil pembangunan, serta efisiensi penggunaan sumber daya alam.

Terdapat berbagai macam indikator tingkat pembangunan. Di antaranya *Gross Domestic Product* (GDP) yang mengindikasikan pertumbuhan penghasilan masyarakat dan *Human Development Index* (HDI) yang merupakan pengukuran perbandingan dilihat dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Menurut penelitian dari (Pramono, 2020) kenaikan GDP di Indonesia tidak selalu sejalan dengan pendapatan kebanyakan penduduk mengenai peningkatan taraf hidup. Ada beberapa alasan mengapa GDP kurang memadai dalam hal mengevaluasi kualitas hidup. Pertama, GDP diukur dalam skala nasional sehingga secara otomatis menyangkal indikasi distribusi kesejahteraan suatu kelompok atau wilayah. Alasan kedua adalah tingkatan GDP atau *income* per kapita dinilai dan dirasakan dengan tingkat yang berbeda pada masing-masing individu. Ketiga, GDP hanya memasukkan aspek materi dan aspek-aspek terukur, namun mengabaikan aspek nonmaterial yang juga penting seperti akses pendidikan dan kesehatan, lingkungan yang aman dan berkelanjutan, partisipasi sosial dan politik, dan kepuasan hidup (*well-being*).

Taigan dalam (Pioh, Rorong, & Walewangko, 2025) menjelaskan bahwa ciri dari pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat akibat adanya penambahan nilai secara keseluruhan dari wilayah tersebut.

(Rinaldi, Pakpahan, Sihombing, Simanjuntak, & Manihuruk, 2025) menjelaskan bahwa dalam pemerataan wilayah, beberapa upaya dapat dilakukan seperti investasi dan infrastruktur, penerapan kebijakan redistribusi pendapatan yang adil, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sehingga, pembangunan dapat berjalan lebih adil dan bermanfaat bagi seluruh lapisan

masyarakat, terutama kelompok miskin yang rentan terhadap dampak ketimpangan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deksriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena ketimpangan ekonomi dan perbedaan pola konsumsi rumah tangga antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Sulawesi Selatan secara mendalam. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan interpretasi fenomena berdasarkan berbagai sumber data tanpa memerlukan eksperimen atau survei langsung kepada responden.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik utama, yaitu :

1. Studi dokumentasi yang menggunakan data resmi dari BPS dan laporan pemerintah terkait.
2. Studi literatur dengan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ketimpangan ekonomi dan konsumsi rumah tangga.
3. Observasi non-partisipan melalui pengamatan langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perkotaan dan perdesaan.

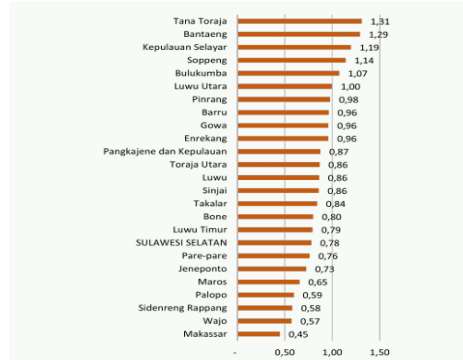
Analisis data dilakukan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya :

1. Analisis Deskriptif. Digunakan untuk menggambarkan karakteristik dan pola konsumsi rumah tangga berdasarkan data yang telah dikumpulkan.
2. Triangulasi. Data diterapkan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan validitas temuan penelitian.
3. Analisis Komparatif. Dilakukan untuk membandingkan kondisi ekonomi dan pola konsumsi antara masyarakat perkotaan dan perdesaan, sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan yang terjadi di antara keduanya.

HASIL

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan Maret 2024-2025, ketimpangan ekonomi di provinsi ini menunjukkan dinamika yang menarik antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada Maret 2024, Gini Ratio di daerah perkotaan tercatat sebesar 0,373 sementara di perdesaan tercatat 0,325. Pada Maret 2025, Gini Ratio Sulawesi Selatan secara agregat menurun menjadi 0,363 yang menunjukkan adanya perbaikan distribusi pengeluaran rumah tangga secara umum. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,373. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,333. Akan tetapi, pola tersebut masih memiliki ketimpangan yang sama dimana perkotaan masih lebih timpang dibandingkan perdesaan

Ukuran ketimpangan lain yang diperkuat dengan indikator Bank Dunia menunjukkan bahwa 40% kelompok terbawah menguasai 18,33 persen total pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, nilai tersebut termasuk dalam kategori ketimpangan rendah (di atas 17%). Artinya, meskipun terjadi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan, namun secara umum angka tersebut masih menunjukkan gejala ketimpangan sedang.



Gambar pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2024

Dari sisi rata-rata pengeluaran per kapita sebulan, Rumah Tangga di perkotaan membelanjakan rata-rata Rp1.538.348, sedangkan di perdesaan hanya Rp1.053.896. Selisih Rp484.752 atau hamper Rp500.000 per bulan ini menunjukkan adanya jurang konsumsi yang cukup lebar. Hal ini menandakan bahwa masyarakat di wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan memiliki perbedaan daya beli, struktur pekerjaan, serta akses terhadap barang dan jasa modern. Fenomena ini sejalan dengan hukum Keynes yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar pula jumlah konsumsi totalnya. Yang artinya, masyarakat kota memiliki pendapatan lebih tinggi akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk konsumsi, namun persentase pendapatan yang mereka konsumsi lebih kecil dibanding masyarakat desa. Hal ini menjelaskan mengapa nilai nominal konsumsi kota jauh lebih besar, meskipun secara proporsional mungkin tidak lebih boros.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting yang memperkuat kesimpulan bahwa ketimpangan ekonomi di Sulawesi Selatan berkorelasi dengan tingkat pembangunan wilayah. Pada tahun 2024, seluruh kota madya telah mencapai status pembangunan “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$), sedangkan 20 kabupaten berada pada kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), dan hanya Kabupaten Jeneponto yang masih dalam kategori sedang (69,45). Menariknya terdapat peningkatan rata-rata IPM sebesar 0,64 poin, dengan empat kabupaten (Tana Toraja, Bantaeng, Kepulauan Selayar, dan Soppeng) mencatat peningkatan tertinggi hingga 0,93 poin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesenjangan antarwilayah masih ada, arah pembangunan manusia di Sulawesi Selatan bergerak positif dan relatif merata.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Sulawesi Selatan bukan hanya persoalan distribusi pendapatan, tetapi juga refleksi dari perbedaan struktur ekonomi dan pola konsumsi antara kota dan desa. Sektor-sektor modern terpusat di kota meningkatkan pendapatan tetapi juga memperluas disparitas. Sedangkan di desa, akses untuk pendidikan yang terbatas dan layanan dasar lainnya menahan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ke depan perlu menekankan transformasi struktural berbasis inklusi wilayah, seperti penguatan ekonomi lokal, pemerataan infrastruktur digital serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya cepat tetapi juga merata dan berkeadilan sosial.

PEMBAHASAN

Kesenjangan pendapatan tercermin dari tingginya Gini Ratio menunjukkan bahwa distribusi pendapatan antarwilayah di Sulawesi Selatan masih belum merata. Masyarakat di wilayah perkotaan memiliki akses ekonomi yang jauh lebih luas dibandingkan masyarakat perdesaan. Posisi mereka diperkuat oleh struktur ekonomi modern. Sementara masyarakat desa cenderung terperangkap dalam lingkaran ekonomi yang sulit berkembang. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan daya beli masyarakat yang cukup signifikan dimana masyarakat wilayah perkotaan dengan akses ekonomi yang

lebih luas memiliki kemampuan konsumsi yang jauh lebih besar dibanding masyarakat perdesaan. Perbedaan daya beli tersebut tidak hanya mencerminkan perbedaan nominal pendapatan, tetapi juga menggambarkan ketimpangan dalam akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan lapangan kerja yang produktif.

Rata-rata pengeluaran per kapita bulanan di perkotaan sebesar Rp1.538.348 jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan (Rp1.053.896). Selisih hamper Rp500.000 per bulan ini menggambarkan jurang konsumsi yang cukup lebar, yang tidak hanya mencerminkan perbedaan daya beli, tetapi juga struktur konsumsi yang berbeda. Perbedaan daya beli ini secara langsung mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga. Masyarakat berpendapatan tinggi di wilayah perkotaan cenderung mengalokasikan pengeluaran mereka pada barang dan jasa modern seperti pendidikan, transportasi, dan komunikasi. Sementara, masyarakat di wilayah perdesaan lebih banyak menghabiskan pendapatannya untuk kebutuhan dasar. Secara empiris, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan di kota tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan relatif, karena sebagian besar konsumsi diarahkan pada kebutuhan non-pokok yang elastis terhadap pendapatan. Sebaliknya, di perdesaan, meskipun konsumsi total lebih rendah, proporsinya terhadap pendapatan jauh lebih besar yang menandakan kerentanan ekonomi yang lebih tinggi. Akibatnya, kebijakan yang berfokus hanya pada pertumbuhan pendapatan rata-rata tanpa memperhatikan struktur konsumsi berpotensi memperlebar jurang kesejahteraan antarwilayah.

Perbedaan pola konsumsi ini memberi pengaruh pada kualitas hidup dan tingkat pembangunan manusia (IPM). Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2024 menunjukkan adanya disparitas pembangunan wilayah di Sulawesi Selatan. Seluruh kota madya telah mencapai status “sangat tinggi” (≥ 80), sedangkan sebagian besar kabupaten masih berada pada kategori “tinggi” (70–79), dan satu kabupaten yaitu Jeneponto masih kategori “sedang” (69,45). Meskipun terjadi peningkatan rata-rata IPM sebesar 0,64 poin dengan kabupaten seperti Tana Toraja, Bantaeng, dan Soppeng mencatat kenaikan tertinggi, perbedaan antardaerah tetap nyata dan signifikan. Ketimpangan IPM ini memiliki hubungan kausal terhadap distribusi pendapatan dan konsumsi. Daerah dengan IPM yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki akses yang lebih mudah terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Dengan demikian, intervensi pembangunan tidak cukup berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu memperluas kebebasan substansif warga untuk mengakses pendidikan, teknologi, dan pasar kerja.

Berdasarkan uraian data tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi di Sulawesi Selatan bukan hanya bersumber pada distribusi pendapatan semata, tetapi juga kesenjangan dalam kapasitas manusia dan struktur konsumsi yang membedakan antara masyarakat kota dan desa. Hal tersebut merupakan hasil interaksi yang kompleks antara distribusi pendapatan, pola konsumsi, dan pembangunan manusia. Meskipun data BPS 2025 menunjukkan tren perbaikan, kesenjangan struktural tetap bertahan. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis wilayah menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi antara kota dan desa di Sulawesi Selatan merupakan hasil interaksi kompleks antara distribusi pendapatan, pola konsumsi, dan pembangunan manusia. Masyarakat perkotaan menikmati akses ekonomi yang lebih luas dan memiliki kemampuan konsumsi terhadap barang serta jasa modern, sedangkan masyarakat perdesaan masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Perbedaan daya beli dan struktur konsumsi ini secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas pembangunan manusia. Daerah dengan IPM tinggi menunjukkan kemampuan konsumsi yang lebih beragam dan produktif, sedangkan daerah dengan IPM rendah cenderung memiliki pola konsumsi subsisten yang terbatas. Dengan demikian, pembangunan manusia bukan hanya indikator kesejahteraan, tetapi juga determinasi utama dalam pembentukan pola konsumsi rumah tangga dan penggerak utama pengurangan ketimpangan ekonomi.

Implikasi kebijakan dari temuan ini menekankan pentingnya transformasi struktural berbasis inklusi wilayah, dengan prioritas pada penguatan ekonomi lokal, pemerataan infrastruktur digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi, memperluas akses terhadap peluang produktif, serta mewujudkan pertumbuhan yang tidak hanya cepat, tetapi juga merata, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan.

REFERENSI

- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Ginanjar, R. F. (2022). Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi di Indonesia . *Jurnal Riset Imu Ekonomi*, -.
- Gunung, E. B., Setiawan, D., & Yasin, M. (2023). Menganalisis Penyebab, Konsekuensi, dan Solusi Potret Ketimpangan Ekonomi. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, 336.
- Handayani, S., & Yulistiyono, H. (2023). Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga dan Pendidikan terhadap Konsumsi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi*, 36.
- Hibaturrohman, I., & Ayu, D. (2024). Konsep Masalah Mursalah dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi di Era Modern : Perspektif Ekonomi Islam. *IQTISHAD SHARIA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam* .
- Nazer, & Lailatussubha, M. (2025). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan : Studi Komparatif Kawasan Indonesia Barat,Timur, Indonesia. *Jurnal Informasi Ekonomi Bisnis*.
- Pioh, Z. O., Rorong, I. P., & Walewangko, E. N. (2025). Analisis Komparatif Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan. *Neraca Manajemen, Ekonomi*.
- Pramono, W. D. (2020). Perencanaan Pembangunan Wilayah. Yogyakarta: PENERBIT DEEPLUBLISH (Grup Penerbitaan CV BUDI UTAMA).
- Rinaldi, M., Pakpahan, G., Sihombing, L. V., Simanjuntak, R. P., & Manihuruk, S. D. (2025). Pengaruh Ketimpangan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Sharia Economics Scholar*.
- Saleh, M. (2021). Pembangunan Ekonomi Inklusif Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan. *Equilibrium*, 25.
- Saragih, D., & Damanik, D. (2022). Pengaruh Pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Kesejahteraan Petani Jagung di Desa Mariah Bandar Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekonoki Pembangunan* , 118.

Suci, A. D., & Sarpini. (2024). Tingkat Konsumsi di Indonesia : Perbandingan Antara Perkotaan dan Pedesaan. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*,